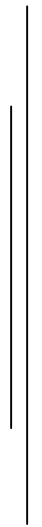


MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN



**EVALUASI CAPAIAN KINERJA
SATKER PUSKEU POLRI TRIWULAN II
TAHUN 2024**



Jakarta, Juli 2024

EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATKER PUSKEU POLRI TRIWULAN II TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Visi, Misi dan tujuan yang ditetapkan oleh Puskeu Polri adalah untuk mewujudkan tugas Puskeu Polri dalam menyelenggarakan fungsi keuangan dibidang pelayanan keuangan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan pembinaan Polri maupun untuk mendukung tugas-tugas Polri. Mengacu pada Visi, Misi dan tujuan Puskeu yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Puskeu Polri Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang tersedia. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Puskeu Polri sebagai Pembina Fungsi keuangan wajib mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan hal yang menjadi prioritas utama maupun menjadi kemampuan dasar bagi pengelola keuangan di lingkungan Polri untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri berdampak pada perubahan Polri secara menyeluruh termasuk reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Penerapan reformasi anggaran yang berorientasi pada pengeluaran jangka menengah dilakukan melalui penataan kembali struktur program dan kegiatan di lingkungan Polri. Restrukturisasi program dan kegiatan bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penerapan akuntabilitas kinerja Polri dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis Polri Tahun 2020-2024.

B. KEDUDUKAN

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Puskeu Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri.

2. Fungsi

- a. pelaksana fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan, strategi, anggaran, sumber daya manusia dan pembinaan fungsi dalam lingkungan Puskeu Polri;
- b. pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Non APBN;
- c. perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode pedoman akuntansi dan keuangan Polri;
- d. pengendalian akan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan;
- e. pelaksana verifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di wilayah;
- f. pelaksana fungsi administrasi keuangan untuk Mabes Polri;
- g. pengelolaan informasi dan dokumentasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Puskeu Polri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. unsur Pimpinan:

Kapuskeu Polri.

2. unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:

a. Sekretariat (Set), terdiri dari:

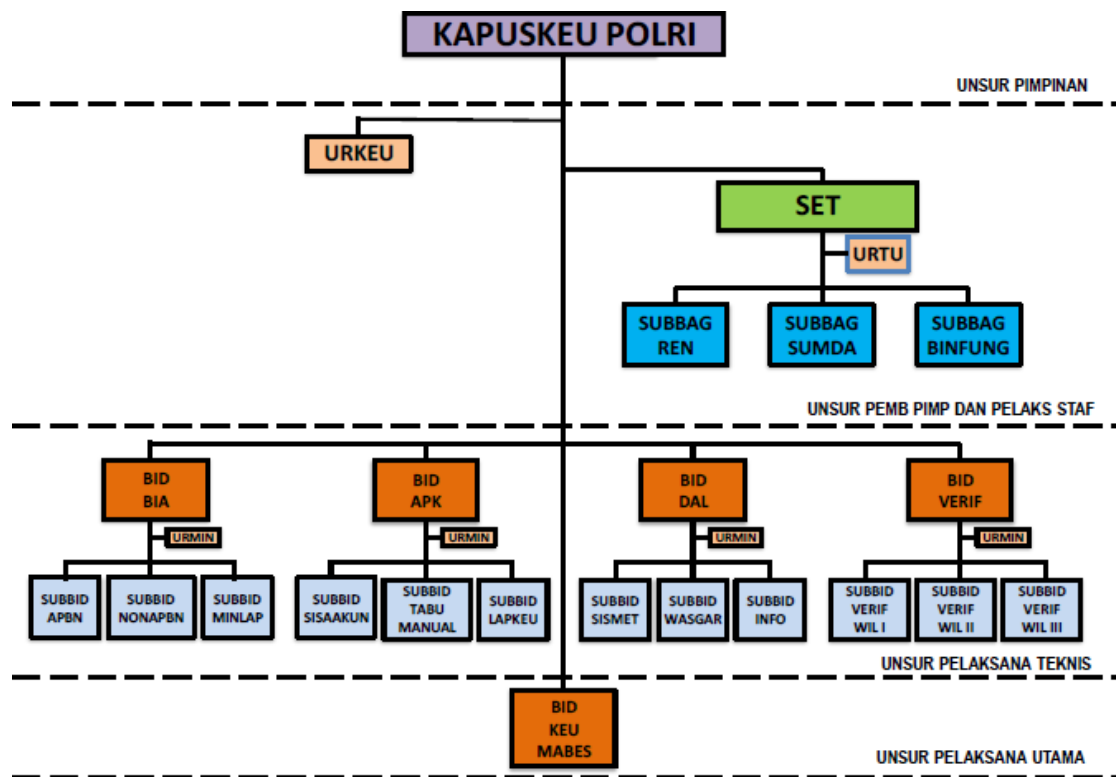
- 1) Subbagren;
- 2) Subbagsumda;
- 3) Subbagbinfung; dan
- 4) Urtu.

b. Urkeu

- b. Urkeu.
- c. Bidang Pembiayaan (Bidbia), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid APBN);
 - 2) Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid non APBN);
 - 3) Subbidang Administrasi Laporan (Subbidminlap) dan;
 - 4) Urmin.
- d. Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bid APK), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Sistem Akuntansi (Subbidsisakun);
 - 2) Subbidang Tata Buku Manual (Subbidtabumanual);
 - 3) Subbidang Laporan Keuangan (Subbidlapkeu) dan;
 - 4) Urmin.
- e. Bidang Pengendalian (Biddal), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Sistem dan Metoda (Subbidsismet);
 - 2) Subbidang Pengawasan Anggaran (Subbidwasgar);
 - 3) Subbidang Informasi (Subbidinfo); dan
 - 4) Urmin.
- f. Bidang Verifikasi (Bidverif), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Verifikasi Wilayah I (Subbidverif Wil I);
 - 2) Subbidang Verifikasi Wilayah II (Subbidverif Wil II);
 - 3) Subbidang Verifikasi Wilayah III (Subbidverif Wil III) dan;
 - 4) Urmin.
- g. Bidang Keuangan Mabes (Bidkeu Mabes).

STRUKTUR

STRUKTUR ORGANISASI PUSKEU POLRI



D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dibuatnya laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Triwulan II T.A. 2024.

2. Tujuan

Adapun tujuannya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Triwulan II T.A. 2024 ini adalah agar capaian kinerja, daya serap anggaran dapat lebih optimal.

E. DASAR

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

2. Keputusan

2. Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Kep/22/XI/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Renstra Strategis Pusat Keuangan Polri Tahun 2020 – 2024;
3. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satker Puskeu Polri T.A. 2024 Nomor : SP DIPA- 060.01.1.642381/2024 tanggal 24 November 2023;
4. Nota Dinas Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: B/ND-109/VI/REN.3.1./2024/Puskeu tanggal 28 Juni 2024 hal permintaan data evaluasi capaian kinerja Triwulan II T.A. 2024.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan laporan ini adalah evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Triwulan II T.A. 2024.

G. Capaian Kinerja Satker Puskeu Polri terhadap IKU Penunjang Polri

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan Polri.
 - a. Membandingkan antara target kinerja tahun 2024 dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan T.A. 2023.	WTP	WTP	WTP

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi.

Anggaran

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 30 ayat (2).

Penyusunan Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan penyusunan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 9 huruf (g). Untuk mewujudkan Laporan Keuangan Polri yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan koordinasi dan rekonsiliasi data untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan perkembangan proses bisnis pengelolaan keuangan negara, evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dan penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Perubahan penerapan akuntansi dari berbasis kas menjadi berbasis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari reformasi dibidang keuangan negara yang dilaksanakan secara bertahap, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Puskeu Polri pada tahun 2024 bertekad mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan indikator atas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta merupakan apresiasi terhadap seluruh Laporan Keuangan Satker di lingkungan Polri yang diwadahi dalam keuangan Polri.

b. Membandingkan

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir.

Bedasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 Nomor: 35.a/LHP/XV/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

Opini	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	85	85	84	82	81
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2	2	4	1	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1	-	-	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	88	87	88	83	85

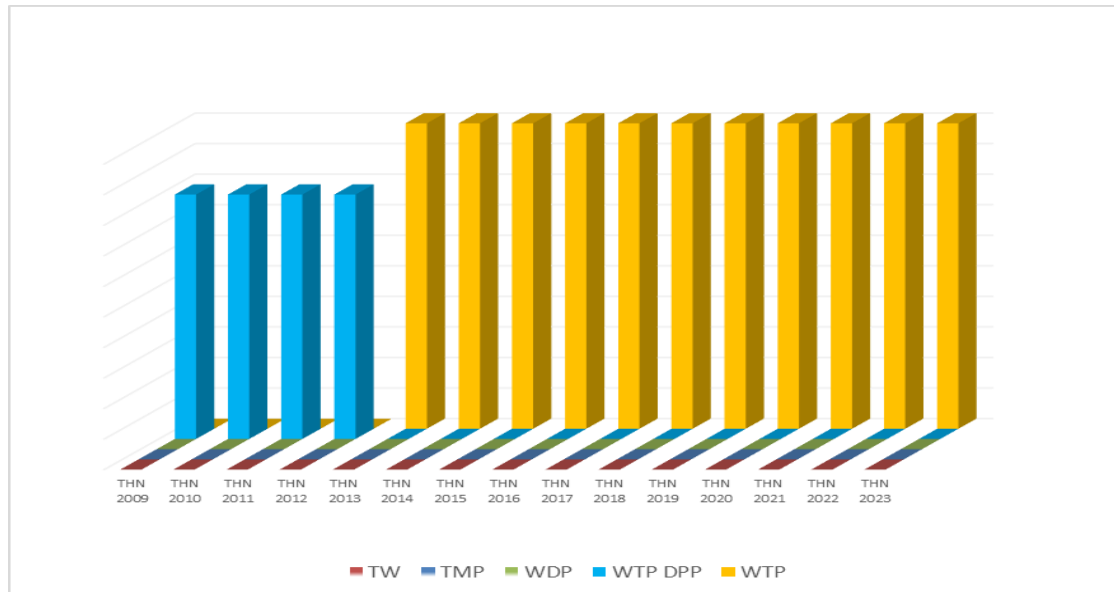
Sumber data: BPK

Ringkasan Eksekutif – LKPP Tahun 2023

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ⁶⁾	WTP	WTP	WDP	⁶⁾	⁶⁾
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	⁶⁾	⁶⁾
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	⁶⁾	⁶⁾
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	⁶⁾	⁶⁾
57.	083	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) ¹⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
74.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	⁶⁾	⁶⁾
75.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
79.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

TREND

TREND KINERJA OPINI BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN POLRI



Laporan keuangan Polri selama 11 tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2023 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Hal ini bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan target yang harus dicapai oleh polri sekaligus merupakan komitmen Polri untuk mewujudkan clean government bidang pengelolaan keuangan negara. Capaian ini bukan berarti bahwa Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Polri terbebas dari objek pemeriksaan BPK. Masih terdapat isu yang akan mempengaruhi Laporan Keuangan Polri T.A. 2023 untuk menindak lanjuti Laporan Keuangan Polri Unaudited T.A. 2023 dan sesuai kesepakatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I.

Komunikasi intensif dan berkelanjutan sangat menentukan derajat kualitas data yang dihasilkan dari proses rekonsiliasi data pada Laporan Keuangan. Komunikasi yang dilakukan oleh Pusat Keuangan Polri begitu luas mencakup banyak pihak yakni mulai dari 36 Bidkeu Polda / Bidkeu Mabes dan pihak Kemenkeu RI sebagai narasumber utama. Diharapkan dengan komunikasi yang baik maka dapat dihasilkan Laporan Keuangan yang akuntabel sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kinerja keuangan kedepannya.

Kegiatan

Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Polri T.A. 2023 Unaudited diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi Pengelolaan Keuangan Negara. Disamping itu laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan selaras dengan program simplifikasi regulasi.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja Triwulan II tahun 2024 dengan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 pada Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan, maka realisasi kinerja tidak mengalami perubahan dimana pada Triwulan II tahun 2024 BPK belum menyatakan Opini (LK Polri Unaudited). Belum disampaikannya Opini dari BPK dapat dijelaskan sebagai berikut:

WAKTU PENGUKURAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN POLRI

NO	URAIAN	BULAN PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semester Tahun Anggaran Berjalan (TAB)	Juli TAB	Laporan Keuangan Semester I
2	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) TAB	September TAB	PDTT BPK
3	Penyusunan Laporan Keuangan TRIWULAN IIII TAB	Oktober TAB	Laporan Keuangan TRIWULAN IIII
4	Interim	November TAB	BPK
5	Penyusunan Laporan Tahunan TAB	Februari TAB+1	Laporan Keuangan Unaudited
6	Rekonsiliasi data antara BPK, Kemenkeu dan Polri	April TAB+1	<i>Tripartied</i>
7	Penyusunan Laporan Keuangan Polri Perbaikan	Mei TAB+1	Laporan Keuangan Audited
8	Penentuan Opini	Mei TAB+1	BPK

c. Analisa

c. Analisa efesiensi penggunaan sumber daya

Secara umum pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I tahun 2024 ini terealisasi sampai dengan tahap penyampaian Laporan Keuangan Polri Unaudited T.A. 2023 kepada Kemenkeu RI, Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan;
- 2) Koordinasi antara fungsi perencanaan (Asrena Kapolri), penguasaan (Slog Polri), pengawasan (Itwasum Polri) dan pelaksana / penanggungjawab kegiatan (KPA);
- 3) Dukungan sarana prasarana yang telah terintegrasi dengan *stakeholder*;
- 4) Dukungan alokasi ketersediaan anggaran yang cukup dalam mendukung penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan Polri.

Berdasarkan empat faktor pendukung di atas, untuk terus mempertahankan Opini WTP dari BPK RI sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Satker Puskeu Polri tahun 2020-2024 maka dalam pelaksanaan Renstra Puskeu Polri tahun ke tiga perlu adanya penambahan alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan kemampuan personel jajaran keuangan, penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan Polri serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung sehingga target pada Renstra Satker Puskeu Polri Tahun 2020-2024 dapat tercapai secara optimal.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara umum pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun 2024 ini terealisasi sampai dengan tahap penyampaian Laporan Keuangan Polri *Unaudited* T.A. 2023 kepada
Kemenkeu

Kemenkeu RI, keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan yaitu adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024;

- 1) Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai;
- 2) Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap kegiatan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
- 3) Dilaksanakannya rapat evaluasi setiap Triwulan terkait capaian kinerja, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut:

- 1) Adanya program/kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung penyajian dan penyusunan laporan keuangan Polri;
- 2) Adanya koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tatakelola keuangan tingkat Satker.

Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang harus dilakukan, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Satker dari hasil pemeriksaan data Laporan Keuangan dan terdapat beberapa temuan pada Laporan Keuangan T.A. 2023 Unaudited yang harus di tindak lanjuti agar tidak terulang kembali sebagai berikut:

- 1) Terdapat *To do List*
 - a) Terdapat Ketidaksesuaian kode akun vs kode persediaan sebesar Rp338.892.017.818,-;
 - b) Terdapat ketidaksesuaian Akun vs BMN sebesar Rp101.257.477.317,-.

2) Penggunaan

- 2) Penggunaan akun pendapatan
Terdapat kesalahan penggunaan akun pendapatan 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang seharusnya 424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah / 424422 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah.
- 3) Kesalahan BAST dan SPM
Terdapat kesalahan dalam pembuatan BAST dan SPM yang tidak terbit SP2D namun belum dibatalkan sehingga mempengaruhi beban dalam neraca percobaan akrual.
- 4) Koreksi pencatatan aset dan persediaan
Terdapat koreksi pencatatan aset dan persediaan yang diinput kembali sebagai perolehan lainnya tidak didukung oleh pengawasan dari Satker sehingga terdapat kurang atau lebih input aset/persediaan.
- 5) Pencatatan aset
Terdapat kesalahan dalam pencatatan aset diantaranya pengembangan aset namun dicatat pembelian sehingga membentuk NUP baru.
- 6) Pencatatan utang persediaan satker BLU
belum mempedomani Petunjuk Teknis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022.
- 7) Hibah
terdapat hibah tahun 2023 yang dilaporkan diawal januari 2024 sehingga dalam penyelesaian mekanisme hibah harus melalui dispensasi dari Kemenkeu RI.
- 8) Pengembalian belanja sumber dana hibah
terdapat pengembalian belanja sumber dana hibah yang tidak melalui mekanisme hibah.
- 9) Piutang BLU
terdapat kesalahan dalam penyajian piutang dan penyisihan piutang BLU.

10) Kesalahan

- 10) Kesalahan dalam penggunaan akun pendapatan terdapat utang yang tidak dicatat dalam LK Polri namun dilakukan pembayaran.
- 11) Stock Opname Persediaan masih terdapat Satker yang belum tertib dalam melakukan Stock Opname Persediaan.
- 12) pendapatan sewa diterima dimuka terdapat kesalahan dalam penyajian akun pendapatan sewaditerima dimuka.
- 13) Resiprokal terdapat Satker yang belum mencatat *Resiprokal*.

Berdasarkan anev Laporan Keuangan Polri tahun 2023 tersebut untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Polri hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- 1) Tidak melakukan kegiatan atau pengadaan yang anggarannya tidak tersedia;
- 2) Pengadaan Barang yang memperhatikan kesesuaian kualitas dan kewajaran harga;
- 3) Interoperabilitas atas pengadaan alat komunikasi dan Alutsista, serta pengadaan alat Teknologi Informasi (TI) dan perangkat lunak yang terintegrasi;
- 4) Cermati pembelian berulang terutama alat komunikasi dan TI terkait eksistensi dan pemanfaatannya;
- 5) Pemenuhan TKDN dan P3DN;
- 6) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK melalui SiPTL;
- 7) Pastikan permasalahan pada laporan keuangan sebelumnya telah di tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil;
- 8) Tingkatkan koordinasi dengan KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Bank Pemerintah serta instansi terkait dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dengan melalui peningkatan kinerja dan pelayanan di bidang Keuangan;
- 9) Tingkatkan

- 9) Tingkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam peningkatan kinerja dan meningkatkan mutu Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Puskeu Polri sebagai Pembina Fungsi keuangan wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan hal yang menjadi prioritas utama maupun menjadi kemampuan dasar bagi pengelola keuangan di lingkungan Polri untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*.

Program Dukungan Manajemen adalah merupakan salah satu program yang terdapat pada Satker Puskeu Polri, dimana di dalamnya terdapat kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan Polri (3068) yang diemban oleh Kapuskeu Polri. Dengan kegiatan ini, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskeu Polri dan Bidkeu Polda sebagai pengemban fungsi administrasi keuangan Polri dapat terakomodir sehingga pengelolaan keuangan negara di jajaran keuangan Polri terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempertahankan Laporan Keuangan Polri dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

- a. Membandingkan antara target kinerja tahun 2024 dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama			Target	Realisasi Triwulan II
Nilai	Indikator	Kinerja		
	Pelaksanaan	Anggaran	94,25	98,24
(IKPA)				

Pada

Pada Triwulan II Tahun 2024 nilai sementara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Polri sebesar 98,24 Apabila dibandingkan antara target kinerja tahun 2024 sebesar 94,25 maka realisasi sebesar 104,2% nilai pada Triwulan II Tahun 2024 ini belum dapat dikatakan tercapai, hal ini dikarenakan nilai kinerja anggaran sifatnya sementara sedangkan target capaian nilai kinerja anggaran merupakan nilai akhir pada tahun anggaran berjalan.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,89	98,24



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

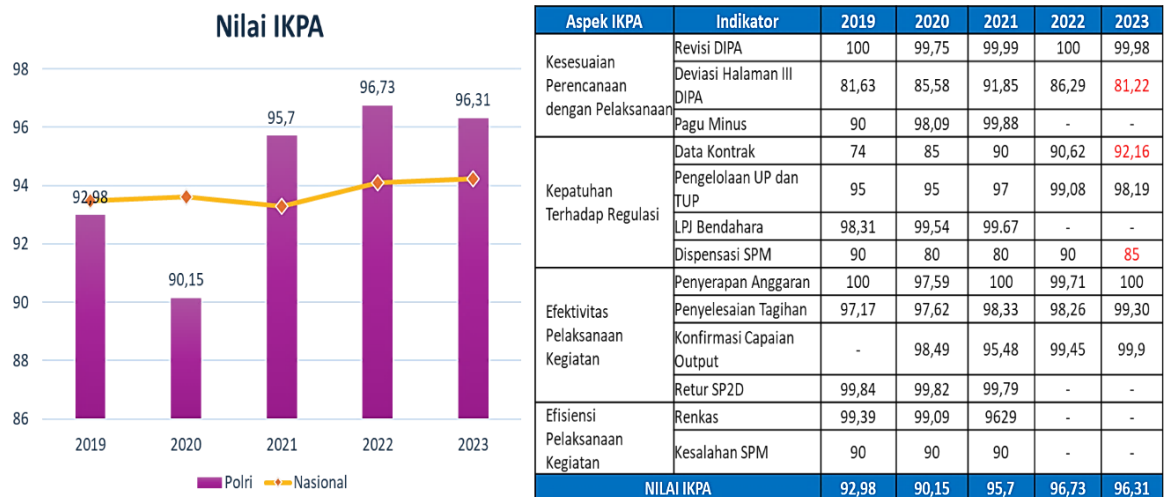
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Nilai	100.00	91.84	100.00	100.00	99.73	98.12	98.73	98.24	100%	0.00	98.24
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.78	20.00	10.00	9.97	9.81	24.68				
			Nilai Aspek	95.92		99.46				98.73				

PERBANDINGAN

PERBANDINGAN NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) NASIONAL DAN POLRI TAHUN 2019 S.D. 2023

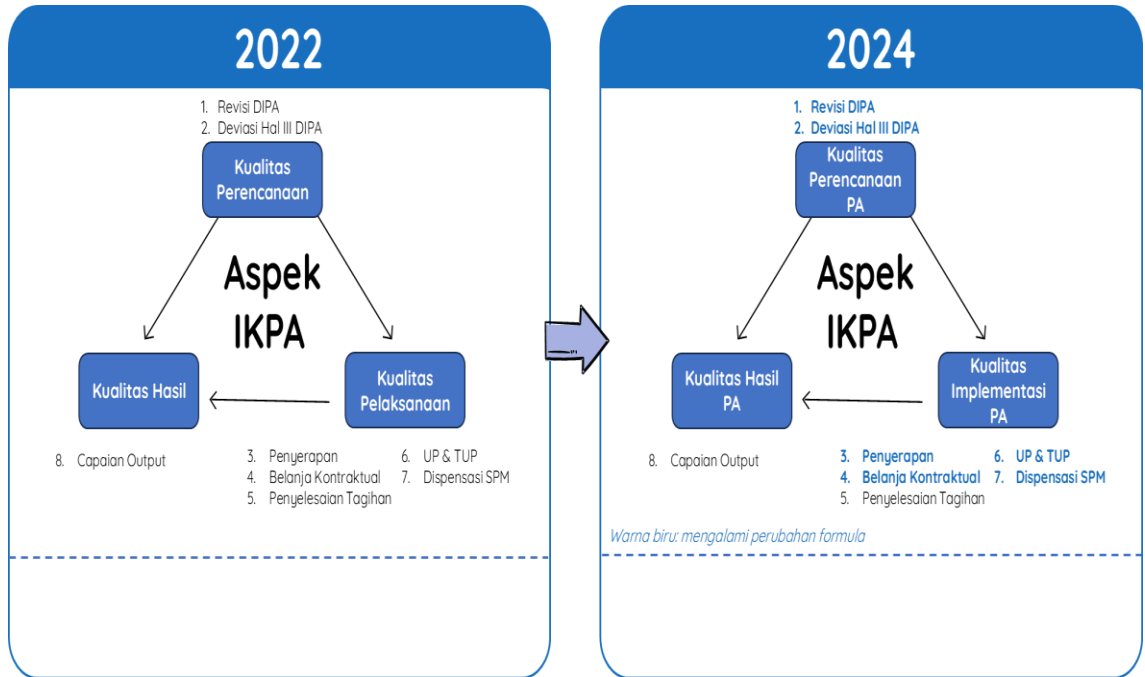


Dari grafik diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai IKPA Kepolisian Negara Republik Indonesia cenderung mengalami perbaikan tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang menurun dan merupakan nilai IKPA terendah yaitu mencapai **90,15 (Baik)**. Sedangkan nilai IKPA tertinggi pada tahun 2022 yaitu **96,73 (Sangat Baik)**;
- 2) Nilai Indikator IKPA Tahun 2023 yang belum optimal adalah **Belanja Kontraktual (92,16)**, **Deviasi Halaman III DIPA (81,22)**, dan **Dispensasi SPM (85)**.

Pada Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024 ditetapkan reformulasi IKPA sebagai berikut:
Latar belakang Reformulasi.

- 1) Mendorong akselerasi belanja dan ketercapaian output belanja;
- 2) Penguatan *fairness treatment dalam* penilaian kinerja pelaksanaan anggaran;
- 3) Penyempurnaan aspek penilaian kinerja sesuai konteks kualitas belanja/*value for money*.



PERBANDINGAN BOBOT INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TAHUN 2022 DENGAN 2024

No.	Indikator	Bobot
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		
1.	Revisi DIPA	10%
2.	Deviasi Hal III DIPA	10%
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3.	Penyerapan Anggaran	20%
4.	Belanja Kontraktual	10%
5.	Penyelesaian Tagihan	10%
6.	Pengelolaan UP & TUP	10%
7.	Dispensasi SPM	5%
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
8.	Capaian Output	25%
$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^n \text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n : \text{Konversi Bobot}$		

No.	Indikator	Bobot
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		
1.	Revisi DIPA	10%
2.	Deviasi Hal III DIPA	15%
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3.	Penyerapan Anggaran	20%
4.	Belanja Kontraktual	10%
5.	Penyelesaian Tagihan	10%
6.	Pengelolaan UP & TUP	10%
7.	Dispensasi SPM	Pengurang Nilai IKPA
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
8.	Capaian Output	25%
$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^n (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n : \text{Konversi Bobot}) - \text{Nilai Indikator Dispensasi SPM}$		

Komparasi

Komparasi Penilaian IKPA TA 2022 vs 2024 per Indikator

No.	Indikator	2022	2024 (Reformulasi)
1	Revisi DIPA	Pengendalian revisi pagu tetap secara triwulanan	Pengendalian revisi pagu tetap secara semesteran
2	Deviasi Hal III DIPA	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata aritmatik	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja .
3	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan yang dihitung berdasarkan trajektori penyerapan anggaran per jenis belanja.	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan trajektori dan penyerapan anggaran per jenis belanja. • Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja.
4	Belanja Kontraktual	Berdasarkan (1) ketepatan waktu , (2) kontrak dini (pra DIPA efektif), (3) akselerasi kontrak 53.	Berdasarkan (1) kontrak dini (pra DIPA efektif), (2) akselerasi kontrak 53, dan (3) distribusi kontrak sampai triwulan II .
5	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual	tetap
6	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP serta terdapat reward untuk penggunaan UP KKP yang mencapai target .
7	Dispensasi SPM	Dihitung sebagai bagian dari komponen dalam perhitungan IKPA	Dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai pengurang nilai IKPA .
8	Capaian Output	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) capaian RO	tetap

c. Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Keberhasilan capaian indikator nilai kinerja anggaran ini didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan dalam pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, diantaranya kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai dan telah terintegrasi dengan *stakeholder*, *sosialisasi*, *monitoring* dan *evaluasi* serta alokasi anggaran yang cukup memadai.

d. analisis

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Puskeu Polri sebagai pembina fungsi keuangan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian nilai kinerja anggaran. Hal ini dikarenakan nilai kinerja anggaran juga berpengaruh terhadap opini yang disampaikan BPK RI atas Laporan Keuangan Polri dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.

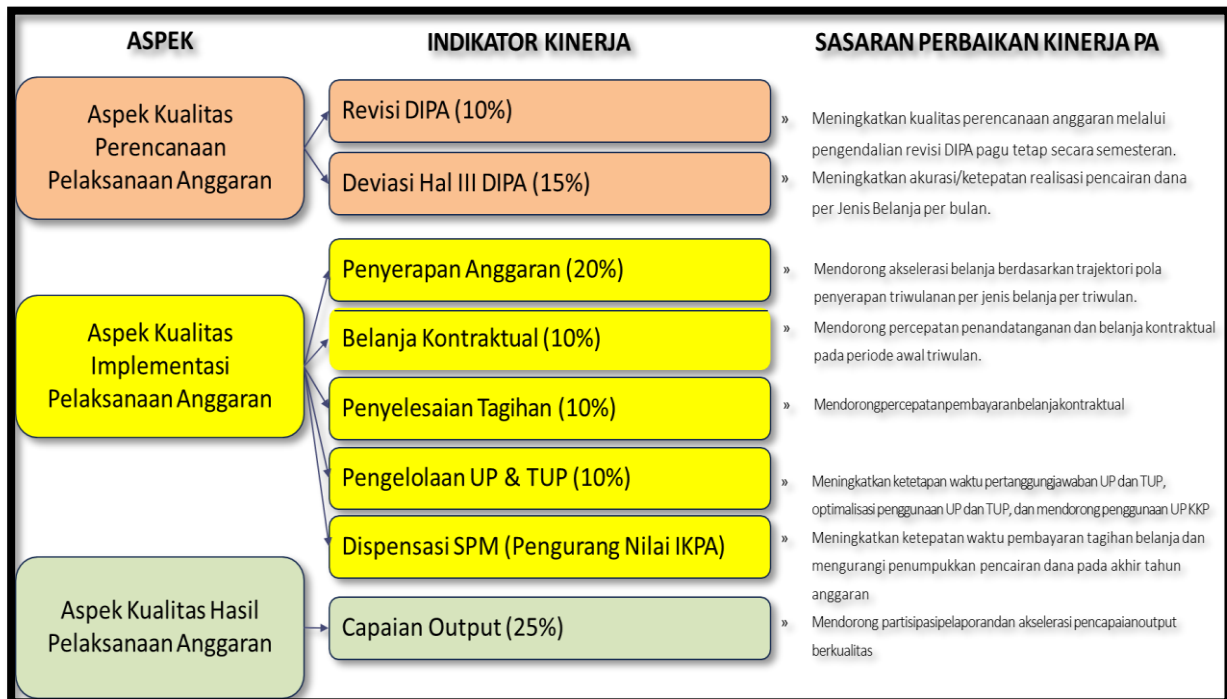
Program Dukungan Manajemen adalah merupakan salah satu program yang terdapat pada Satker Puskeu Polri, dimana di dalamnya terdapat kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan Polri (3068) yang diemban oleh Kapuskeu Polri. Dengan kegiatan ini, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskeu Polri dan Bidkeu Polda sebagai pengemban fungsi administrasi keuangan Polri dapat terakomodir.

Ketertiban Satker dalam pengelolaan uang persediaan, memasukkan data kontrak tepat waktu, menghindari kesalahan dalam membuat Surat Perintah Membayar (SPM), menghindari Retur SP2D, melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA), menghindari/meminimalisir revisi DIPA, penyelesaian tagihan tepat waktu, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, membuat perencanaan kas yang baik dan realisasi anggaran yang tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan Satker serta melakukan pelaporan capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan SAKTI secara disiplin setiap bulan merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan pencapaian target pada Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Untuk dapat mencapai target Nilai Kinerja Anggaran pada akhir tahun diharapkan Satker Mabes dan kewilayahan dapat mempedomani langkah-langkah sebagai berikut :

LANGKAH

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PENINGKATAN IKPA



H. Capaian Kinerja Satker Puskeu Polri terhadap Perjanjian Kinerja Satker Puskeu Polri.

1. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kapasitas jaringan keuangan dalam pengelolaan Keuangan Negara;
 - 1) Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW II Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA \geq 93,5	79%	87,58%	111%

Pencapaian target jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA \geq 93,5 dengan targer sebesar 79% realisasi s.d. TW II T.A. 2024 sebesar 87,58% dengan keterangan terdapat 1263 Satker dari 1442 Satker yang mendapat Nilai IKPA 93,5.

2) Membandingkan

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja TW I Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW II T.A. 2023	Realisasi TW II T.A. 2024	Capaian
Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA \geq 93,5	60%	87,58%	145,9%

Jika dibandingkan Pencapaian target meningkatkan Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA \geq 93,5 pada TW II T.A. 2023 sudah tercapai 60%, namun pada T.A. 2024 tercapai sebesar 87,58% sudah melebihi target yang telah ditentukan, Hal ini dikarenakan Puskeu Polri secara berkala melaksanakan evaluasi Pelaksanaan IKPA, dengan Kegiatan Vicon Anev IKPA Polri Semester I T.A. 2024 yang diikuti oleh 1442 Satker di jajaran Polri, pimpinan Kapuskeu Polri.

- b. Menjamin kelancaran penyelenggaraan administrasi dan evaluasi pembiayaan.
- 1) Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW II Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bidang Pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri	100%	50%	50%

Capaian Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan bidang pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri TW II sebesar 50%, hal ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan per Triwulan.

Setiap

Setiap Triwulan Bidang pembiayaan menyerahkan Laporan Administrasi Keuangan Bidang Pembiayaan (Tunkin, Kontijensi, PLN, PDN, FPU) untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Bid APK untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Polri.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja TW II Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW II T.A.2023	Realisasi TW II T.A.2024	Capaian
Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bidang Pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri	50%	50%	100%

Apabila dibandingkan antara Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan bidang pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri TW II T.A. 2023 dengan TW II T.A. 2024 sebesar 50% maka realisasi tidak mengalami perubahan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada setiap triwulan.

- c. Menjamin kelancaran penyelenggaraan verifikasi terhadap Dokumen Perwabkeu.

- 1) Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW II Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Bidkeu Polda dan mabes yang mendapatkan (NPHPW) oleh Puskeu Polri	36 Bidkeu Polda dan Mabes	-	-

NPHPW sampai triwulan II T.A. 2024 belum bisa diterbitkan oleh Bid Verif Puskeu dikarenakan pekerjaan kegiatan pada Satker pelaksana belum selesai/belum sampai pelunasan.

- 2) Membandingkan

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja TW II Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW II T.A. 2023	Realisasi TW I T.A. 2024	Capaian
Jumlah Bidkeu Polda dan mabes yang mendapatkan (NPHPW) oleh Puskeu Polri	13 Bidkeu	-	-

Realisasi Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan Nota Hasil Pemeriksaan Perwabkeu (NPHPW) oleh Puskeu Polri apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada TW II Tahun 2023 dan TW II 2024 belum tercapai, hal ini dikarenakan pada Setiap Polda kegiatan belum terselesaikan oleh seluruh Satker.

- d. Menyajikan Laporan Keuangan yang profesional, transparan, akuntabel dan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- 1) Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW II Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti	100%	90%	90%

Persentase rekomendasi BPK RI atas laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti dengan penanggung jawab Bid APK target T.A. 2024 sebesar 100%, dan realisasi s.d. TW I T.A. 2024 tercapai sebesar 90%, dikarenakan Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Polri yang rinci belum dapat seluruhnya dilaksanakan karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Polri baru akan Terbit pada Triwulan III 2024 (Juli 2024).

- 2) Membandingkan

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja TW II Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW II T.A. 2023	Realisasi TW II T.A. 2024	Capaian
Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti	100%	90%	90%

Jika dibandingkan Pencapaian target Persentase rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti pada TW II T.A. 2023 dan TW II T.A. 2024 sebesar 90% hal ini dikarenakan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Polri belum dapat diterbitkan.

2. Monitoring dan evaluasi atas indikator efektifitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi dalam kinerja pelaksanaan anggaran.
- a. Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW II Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puskeu	93,00	93,40	100,4%

Target Kinerja IKPA Tahun 2024 adalah 93,00 dan realisasi Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 93,40 atau mencapai 100,4%.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja TW II Tahun 2023 dengan realisasi kinerja TW II Tahun 2024.

REALISASI

REALISASI KINERJA NILAI IKPA PUSKEU POLRI TW II TAHUN 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSKEU POLRI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	060	642381	PUSKEU POLRI	Nilai	100.00	100.00	99.24	100.00	100.00	100.00	74.20	93.40	100%	0.00	93.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.85	10.00	10.00	10.00	18.55				
					Nilai Aspek	100.00		99.81				74.20				

REALISASI KINERJA NILAI IKPA PUSKEU POLRI TW II TAHUN 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSKEU POLRI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	088	060	642381	PUSKEU POLRI	Nilai	100.00	60.77	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	72.53	89.21	100%	89.21
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.08	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	18.13			
					Nilai Aspek	80.39		100.00				72.53				

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai IKPA Satker Puskeu Polri TW II T.A. 2023 sebesar 89,21 lebih rendah dibandingkan dengan nilai IKPA Satker Puskeu Polri TW II Tahun 2024 93,40. Namun demikian capaian Triwulan II Tahun 2024 sifatnya sementara dikarenakan target capaian nilai kinerja anggaran merupakan nilai akhir pada tahun anggaran berjalan.

3. Monitoring dan evaluasi atas Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri
 - a. Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW I Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu	74,50	-	-

Target

Target Kinerja nilai AKIP Puskeu Polri sebesar 74,50 sampai dengan TW I tahun 2024 belum terealisasi hal ini dikarenakan Belum ada penilaian dari tim evaluator APIP.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja TW II Tahun 2022 dengan realisasi kinerja TW II Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW I T.A. 2023	Realisasi TW I T.A. 2024	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu.	-	-	-

Jika dibandingkan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu antara TW II tahun 2023 dan TW II tahun 2024 sama-sama belum ada realisasi, hal ini dikarenakan belum ada penilaian dari tim evaluator APIP evaluasi baru akan dilaksanakan pada bulan Juli T.A. 2024.

4. Peningkatan Profesionalisme SDM bidang Keuangan

- a. Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi bendahara	94%	-	-

Target kinerja persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi Bendahara sebesar 94% sampai dengan TW I tahun 2024 belum terealisasi, hal ini dikarenakan pelaksanaan Diklat pada bulan Juli menyesuaikan dengan jadwal dari Pusdiklat AP Kemenkeu RI terkait pelaksanaan Diklat Bendahara di lingkungan Polri.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan realisasi kinerja TW I Tahun 2024.

Indikator

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW II T.A. 2023	Realisasi TW II T.A. 2024	Capaian
Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi bendahara	-	-	-

Jika dibandingkan Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi Bendahara antara TW II tahun 2023 dan TW II tahun 2024 belum ada realisasi, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan Juli dan saat ini masih dilaksanakan pendataan peserta pada jajaran Bidkeu Polda dan Mabes berkoordinasi dengan Kabidkeu Polda jajaran.

I. Target Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme pada Satker Puskeu Polri maka disusun target kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi TW I Tahun 2024	%
1	Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA \geq 93,5	79%	87,58%	111%
		Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan Nota hasil Pemeriksaan Perwabkeu (NHPW) oleh Puskeu Polri	36 Bidkeu polda dan Mabes	-	-
2	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bidang Pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri;	100%	50%	50%
		Persentase rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti	100%	90%	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi TW I Tahun 2024	%
3	Kelembagaan yang Akuntabel dan SDM yang Presisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri	74,50	-	-
		Nilai Kinerja Pelaksana Anggaran Puskeu	93,00	93,40	100,4%
		Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi Bendahara .	94%	-	-

J. PENUTUP

Demikian pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri TW II T.A. 2024 disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi.

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



Ditandatangani secara elektronik
LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI